

Penyuluhan Hukum Tentang Peran Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tindak Pidana di Kelurahan Labuhan Deli

Togar Sahat Manaek Sijabat¹, Anderson Siringo-ringo², Dameyanti Simamora⁴, Salim Febriaman Zega⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : togarsijabat12@gmail.com

Abstrak. Penyuluhan hukum yang efektif mengenai bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kelurahan Labuhan Deli tentang hak-hak mereka dalam menghadapi tindak pidana. Melalui edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi mereka, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga bantuan hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan aparat hukum, Kelurahan Labuhan Deli dapat menjadi contoh yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan pemberian bantuan hukum yang efektif bagi seluruh warganya.

Abstract. Effective legal counseling regarding legal aid and protection of human rights is very important in increasing the awareness and understanding of the people of Labuhan Deli Village regarding their rights in facing criminal acts. Through appropriate education, it is hoped that society can gain fair access to justice and protection of their human rights, as well as minimizing the occurrence of human rights violations. By involving various parties, such as legal aid institutions, the government, community leaders and legal officials, Labuhan Deli Village can be a good example in implementing the principles of protecting human rights and providing effective legal assistance to all its citizens.

Historis Artikel:

Diterima: 22 Januari 2024

Direvisi: 31 Januari 2024

Disetujui: 03 Februari 2024

Kata Kunci:

Perlindungan; Asasi; Pidana

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum adalah bagian dari upaya edukasi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum, hak, dan kewajiban mereka. Di tingkat kelurahan, penyuluhan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai hak-hak mereka, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan akses terhadap bantuan hukum, terutama dalam menghadapi tindak pidana.

Kelurahan Labuhan Deli, sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Medan Marelan, memiliki potensi untuk menjadi tempat yang strategis dalam penyuluhan hukum terkait hak asasi manusia dan tindak pidana. Melalui penyuluhan hukum yang efektif, masyarakat di Kelurahan Labuhan Deli diharapkan dapat memahami pentingnya perlindungan HAM dan bagaimana mekanisme bantuan hukum dapat diakses, terutama bagi mereka yang terlibat dalam atau menjadi korban tindak pidana.

Artikel ini akan mengulas peran bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks tindak pidana di Kelurahan Labuhan Deli, serta pentingnya penyuluhan hukum untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menanggapi isu-isu hukum.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Penyuluhan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan pemahaman tentang hak-hak hukum dan perlindungan terhadap tindak pidana, terutama bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum. Penyuluhan hukum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Sosialisasi tentang Bantuan Hukum

Masyarakat di Kelurahan Labuhan Deli perlu diberi informasi mengenai pentingnya bantuan hukum dan bagaimana cara mengaksesnya. Penyuluhan ini bisa dilakukan dengan menghadirkan

praktisi hukum yang berkompeten, serta menjelaskan prosedur dan lembaga yang menyediakan bantuan hukum gratis atau dengan biaya rendah.

2. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Penting untuk memberikan edukasi kepada warga mengenai hak-hak dasar yang mereka miliki menurut hukum, seperti hak atas perlindungan, kebebasan pribadi, dan hak untuk diperlakukan dengan adil di hadapan hukum. Penyuluhan ini bisa dilakukan di tingkat RT/RW atau dalam pertemuan komunitas di masjid atau tempat-tempat ibadah lainnya.

3. Workshop atau Seminar Hukum

Penyuluhan lebih mendalam dapat dilakukan melalui seminar atau workshop yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat hukum, dan lembaga perlindungan anak atau perempuan. Dengan cara ini, warga dapat lebih memahami mekanisme perlindungan hukum dalam menghadapi tindak pidana dan bagaimana cara melaporkan kasus pelanggaran HAM.

4. Pemanfaatan Teknologi

Dalam era digital, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan hukum, seperti melalui media sosial, grup WhatsApp, atau platform online lainnya yang dapat mengakses informasi hukum secara lebih luas dan mudah.

METODE

Beberapa peran penting bantuan hukum bagi masyarakat di Kelurahan Labuhan Deli, antara lain:

1. Menjamin Akses ke Keadilan

Bantuan hukum membantu masyarakat yang tidak mampu mengakses pengacara atau penasihat hukum. Tanpa adanya bantuan hukum, banyak orang yang tidak dapat mempertahankan hak-hak mereka di pengadilan.

2. Melindungi Hak-Hak Tersangka atau Korban

Bantuan hukum menjamin bahwa baik korban maupun pelaku tindak pidana mendapat perlakuan yang adil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa hak asasi manusia mereka dihormati.

3. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai pelaku maupun korban, turut meningkatkan pemahaman mereka mengenai prosedur hukum yang benar dan hak-hak mereka dalam sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum yang efektif mengenai bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kelurahan Labuhan Deli tentang hak-hak mereka dalam menghadapi tindak pidana. Melalui edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi mereka, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Adapun yang menjadi pembahasan:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Banyak warga yang tidak tahu hak-hak mereka atau bagaimana cara mengakses bantuan hukum, sehingga mereka tidak melaporkan tindak pidana atau melibatkan pengacara dalam proses hukum.

2. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Bantuan Hukum

Bantuan hukum gratis atau biaya rendah tidak selalu tersedia dengan mudah, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan fasilitas hukum, seperti di kelurahan-kelurahan di pinggiran kota.

3. Stigma Sosial

Di beberapa komunitas, ada stigma yang melekat pada korban tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat korban enggan untuk melaporkan kasusnya ke pihak berwenang atau mencari bantuan hukum.

4. Proses Hukum yang Panjang dan Rumit

Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menjadi kendala bagi warga untuk mendapatkan keadilan. Banyak orang merasa kesulitan dan memilih untuk tidak melanjutkan kasus pidana mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan hukum yang efektif mengenai bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kelurahan Labuhan Deli tentang hak-hak mereka dalam menghadapi tindak pidana. Melalui edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi mereka, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM.

Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga bantuan hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan aparat hukum, Kelurahan Labuhan Deli dapat menjadi contoh yang baik dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan pemberian bantuan hukum yang efektif bagi seluruh warganya. Adapun sarannya adalah Pemerintah Kelurahan dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, organisasi HAM, dan perguruan tinggi hukum untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan praktis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penelitian ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

1. Dosen Pembimbing dan Pengajar yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga, baik dalam menyusun kerangka teori maupun dalam memberikan wawasan yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Kepala Desa dan Aparat Desa Kecamatan Medan Helvetia, yang telah berperan aktif dalam mendukung penyuluhan hukum ini dan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah adat serta hak-hak masyarakat dalam konteks hukum pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH).